



**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH DATAR**

RENCANA KERJA

(R E N J A)

TAHUN 2019

BATUSANGKAR, AGUSTUS 2019

KATA PENGANTAR

Pertama – tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karuniaNya maka penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 telah dapat diselesaikan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 – 2021 berada dalam tahap reformasi dan tuntutan era globalisasi yang semakin kuat. Reformasi yang mengarah kepada demokrasi, partisipasi, transparansi, desentralisasi dan *good governance* menyebabkan manajemen penyelenggaraan administrasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu berbenah diri untuk mengantisipasi perubahan zaman. Kejelasan visi, misi, strategi dan kebijakan yang digunakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan akan dapat membawa dampak yang positif untuk menghadapi persaingan global dengan rasa percaya diri dan siap untuk bersaing.

Rencana Kerja Tahun 2019 adalah salah satu dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk memenuhi tuntutan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten Tanah Datar ke depan. Pada dasarnya program/kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan tahun 2017, dan berharap dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan walau tidak secara keseluruhan, namun setidaknya dapat mengatasi beberapa isu/masalah mendesak yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Akhirnya kepada seluruh aparatur kantor Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Tanah Datar dan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan diharapkan dapat mempedomani Rencana Kerja Tahun 2019 ini sebagai wujud transparansi

dan arahan operasional dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Batusangkar, Januari 2018

KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR

I R W A N, S.Sos, M.Si
NIP. 19670617 198903 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi dan SKPD	27
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	34
2.5. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat	35
 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	 36
3.1. Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	40
 BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	 44
 BAB V. PENUTUP	 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah termasuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diharuskan menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan mempedomani pada Rencana Strategis (Renstra) dan RKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan rencana pembangunan tahunan OPD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang disusun berdasarkan RENSTRA OPD dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Tanah Datar yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan dengan tugas pokok dan fungsi serta arah kebijakan yang disusun oleh OPD. Isu strategis yang ada kemudian digabungkan dan disinergikan dengan OPD lain, untuk dibahas dalam Forum Internal OPD.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. Perencanaan dimaksud suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyusunan Rencana Kerja tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan input yang ada. Diantara input tersebut yang terpenting adalah penyediaan anggaran pelaksanaannya. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi.

Rencana kerja tahun 2019, bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan pelaksanaan tahun pertama program jangka menengah karena pencapaian sasaran strategisnya disusun untuk jangka waktu 6 tahun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Datar ke depan. Hal ini berarti

pelaksanaan rencana kerja ini merupakan suatu komitmen bersama yang akan dipertanggung-jawabkan sebagai evaluasi keseluruhan nantinya terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam menyusun rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar periode 2019 disusun berdasarkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang perangkat Daerah.
4. Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga serasi dan selaras sesuai dengan Rencana Strategis kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2016-2021, baik dalam kebijaksanaan umum maupun dalam strategi.
2. Untuk mengetahui/mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
3. Untuk menentukan tindakan/langkah yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan yang memuat visi, misi Kabupaten Tanah Datar serta sebagai pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil dari pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis dan kesinambungan.

Adapun tujuannya adalah :

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
2. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan perencanaan tahunan berikutnya.
3. Tercapainya indikator kinerja program dan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Kebijakan nasional dan Renja K/L
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Datar dan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada sesuai dengan **fungsi** dan **urusan** pemerintahan yang dilimpahkan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar yang telah menyelenggarakan belanja berdasarkan urusan wajib yang dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai implementasi dari kebijaksanaan dan kumpulan dari kegiatan nyata yang disusun secara sistematis untuk mencapai sasaran dan tujuan 5 (lima) tahun RPJMD.

Sesuai Rencana Strategis Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 terdapat 4 tujuan dan 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahun 2019 terdapat 1 urusan wajib pemerintahan yang terdiri dari 10 (sepuluh) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan.

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar rata-rata di atas 80% bahkan ada beberapa kegiatan yang mencapai 98%. Berikut capaian kinerja masing-masing kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017 :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran, terdiri atas kegiatan:

1. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan 1 (unit) unit lemari arsip. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- realisasi Rp. 5.000.000,- atau 100 %.

b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan 1 unit wire less dan 1 unit genset. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi Rp. 8.820.000,- atau 88.20 %.

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa perbaikan pintu, kamar mandi, dan pengecatan gedung kantor.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 13.000.000,- realisasi Rp. 12.014.500,- atau 92,42 %.

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kegiatan ini terealisasi berupa perbaikan, pemeliharaan dan pengadaan BBM 4 (empat) unit kendaraan dinas roda 2 dan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda 4.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 96.700.000,- realisasi Rp.60.424.160,- atau 62.49 %.

e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan 5 (lima) unit PC, 5 (lima) unit Laptop, 5 (lima) unit printer dan 4 (unit) kipas angin.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000,- realisasi Rp.5.711.000,- atau 81.59 %.

f. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan meubeleur kantor (kursi, meja lemari arsip dll) .

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,- realisasi Rp. 1.200.000,- atau 60 %.

2. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini terealisasi berupa perjalanan dinas pelatihan anjab.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,- realisasi Rp. 782.000,- atau 7,82%.

Pelatihan bagi pegawai Kesbang belum maksimal terlaksana karena jumlah pegawai yang sedikit tidak memungkinkan untuk pegawai meninggalkan pekerjaan rutin.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Kegiatan Penyusunan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan LAKIP, LKPJ, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi Rp. 4.342.000,- atau 43,42 %.

b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan laporan keuangan semester dan tahunan.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000,- realisasi Rp.7.778.000- atau 97,23 %.

4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kegiatan ini terealisasi berupa pemantauan kegiatan masyarakat dalam rangka pergantian akhir tahun menyongsong tahun baru oleh tim gabungan dari Polres, Kodim, Pol PP, Dishub dan Dinkes.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 131.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar Rp. 124.114.000,- atau 94,74%

b. Kegiatan Fasilitas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Kegiatan ini memfasilitasi kelembagaan yang berbentuk Forum komunikasi Inteligen Daerah atau KOMINDA. Kegiatan ini memfasilitasi anggota kominda dalam rangka melaksanakan tugas berupa komunikasi dan koordinasi unsur inteligen di daerah sebanyak 12 (dua belas) kali pertemuan dalam 1 (satu) tahun. Dana

yang dianggarkan sebesar Rp. 309.020.000,- dengan realisasi fisik sebesar Rp. 253.267.922,- atau 81,96 %.

c. *Kegiatan Fasilitas Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)*

Kegiatan ini terealisasi berupa fasilitasi untuk Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem). Kegiatannya dalam bentuk pengawasan terhadap aliran kepercayaan dengan cara bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri. Pengawasan yang dilaksanakan selama ini meliputi bidang keagamaan dan aliran kepercayaan. Pada aliran kepercayaan, yang diawasi oleh Tim antara lain adalah konflik antar intern penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konflik antar penganut aliran kepercayaan, aktivitas aliran yang telah dibubarkan, dan aliran kepercayaan yang berasal dari luar negeri.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 240.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar Rp. 174.948.600,- atau 72,90 %.

d. *Kegiatan Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat*

Kegiatan ini terealisasi berupa fasilitasi untuk informan nagari. Dana yang dianggarkan sebesar Rp.190.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar Rp. 168.905.000,- atau 88,90 %.

e. *Fasilitasi Penanganan Isu Strategis Daerah*

Kegiatan ini memfasilitasi Forum komunikasi Pimpinan Daerah. dalam rangka melaksanakan tugas berupa komunikasi dan koordinasi unsur Pimpinan di daerah sebanyak 12 (dua belas) kali pertemuan dalam 1 (satu) tahun.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 248.620.000,- dengan realisasi fisik sebesar Rp. 197.065.313,- atau 79,26 %.

5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanganan Konflik di Tengah Masyarakat

Kegiatan ini terealisasi berupa pencegahan, penanganan konflik dan pengendalian kamtramtibmas.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp.221.878.000,- dengan realisasi fisik sebesar Rp. 136.323.200,- atau 61,44%

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Kegiatan ini terealisasi berupa kegiatan bela Negara bagi generasi muda terhadap siswa SLTA dan fasilitasi upacara hari besar nasional.

Dana yang dianggarkan Rp. 250.412.000,- dengan realisasi fisik sebesar Rp. 205.005.500 atau 81,87 %

b. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Perjuangan

Kegiatan ini terealisasi berupa kegiatan temu ramah dengan veteran pada peringatan hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2017 dan peringatan hari Pahlawan 10 November 2017.

Dana yang dianggarkan Rp. 142.100.000 dengan realisasi fisik sebesar Rp. 86.579.400 Atau 60,93 %

c. Kegiatan Fasilitasi Forum Wawasan Kebangsaan

Kegiatan ini terealisasi berupa pemberian fasilitasi kegiatan lomba seperti lomba menyanyikan lagu wajib, lomba PBB (persatuan Baris berbaris) dan lomba cerdas cermat dengan tema wawasan kebangsaan antar sekolah se Kabupaten Tanah Datar dan sosialisasi Wawasan Kebangsaan kepada 150 orang siswa SMA/SMK/MA.

Dana yang dianggarkan Rp. 116.550.000,- dengan realisasi fisik sebesar Rp. 80.221.600,- atau 68,83 %

7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Kegiatan ini terealisasi berupa penyebarluasan informasi bahaya narkoba melalui Poster, dan sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat, ormas dan OKP se Kabupaten Tanah Datar.

Dana yang dianggarkan Rp. 263.238.000,- dengan realisasi fisik sebesar Rp. 165.636.800,- atau 62,92 %

b. Penyuluhan Pencegahan Dini Penyakit Masyarakat

Kegiatan ini terealisasi berupa penyuluhan tentang penyakit masyarakat kepada masyarakat ke 14 Kecamatan, dan

penyebarluasan informasi bahaya pekat melalui spanduk baliho dan poster.

Dana yang dianggarkan Rp. 351.664.000,- dengan realisasi fisik sebesar Rp. 232.372.400,- atau 66,08 %

8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

a. Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Kegiatan ini terealisasi berupa fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil pemilu tahun 2014-2019.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 47.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar Rp. 30.776.000,- atau 65,48 %

b. Pembinaan Organisasi Masyarakat

Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi Perpu No.2 Tahun 2017 dan Undang- Undang tentang Ormas kepada Ormas se Kabupaten Tanah Datar

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 46.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar Rp. 24.847.600,- atau 54,02 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berikut capaian kinerja masing-masing kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017 :

Urusan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah *Urusan Wajib*.

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri terdiri atas program, kegiatan, realisasi pelaksanaan, permasalahan dan solusinya. Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- a. Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan Kegiatan ini berupa pengamanan penggantian tahun 2017 ke 2018, dengan menempatkan personil Polri, TNI, Pol PP, Dishub, dan Dinkes sebanyak 423 personil selama 3 hari dari tanggal 29 s/d 31 Januari 2017 untuk melakukan pengawasan di daerah keramaian acara pergantian tahun dengan capaian kinerja kegiatan 100 %. Pada tahun ini sebagian besar masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk tidak turun ke jalan

dalam merayakan malam pergantian tahun sehingga pada malam pergantian tahun kondisi keamanan di berbagai tempat terpantau kondusif.

b. Kegiatan Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kesbangpol dalam bentuk memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi antara Polres, Kejaksaan Negeri, Kodim, Imigrasi dan BIN Provinsi Sumbar untuk membicarakan persoalan yang terjadi di kabupaten Tanah Datar yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Selama tahun 2017 telah dilaksanakan 10 kali rapat dari rencana 12 kali rapat dengan capaian kinerja kegiatan 83 %.

c. Kegiatan Fasilitasi Aliran Kepercayaan Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Instansi Vertikal Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Selain itu dalam kegiatan ini Kantor Kesbangpol juga memfasilitasi Kejaksaan Negeri, dengan Instansi Vertikal lainnya untuk rapat dan koordinasi membahas aliran kepercayaan yang berkembang di masyarakat saat ini yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Selama tahun 2017 telah dilaksanakan 1 kali kerjasama dan 7 kali rapat dari rencana 12 kali rapat dengan capaian kinerja kegiatan 79,18 %.

d. Kegiatan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Kegiatan ini dengan menempatkan tenaga informan pada 75 Nagari masing-masing 1 orang. Tenaga Informan ini bertugas memantau keadaan Nagari untuk kemudian dilaporkan ke Kantor Kesbangpol . Data FKDM ini menjadi salah satu bahan dalam Rapat Koordinasi dengan Instansi Vertikal dan sebagai laporan kepada Bupati. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

e. Fasilitasi Penanganan Isu Strategis Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kesbangpol dalam bentuk fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Forkopinda Kabupaten Tanah Datar untuk membahas Isu Strategis Daerah. Selain itu juga memfasilitasi kunjungan kerja atau Studi Banding Forkopinda Kab Taah Datar. Selama tahun 2017 dari rencana 12 kali rapat telah terlaksana 8 kali rapat dengan capaian kinerja kegiatan 66,66 %. Sulitnya menyesuaikan

jadwal Pimpinan Daerah menjadi kendala dalam pelaksanaan Rapat koordinasi Isu Strategis

2. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

a. Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanganan Konflik di Tengah Masyarakat

Indikator persentase konflik yang terselesaikan atau termediasi diukur dengan terselesaikan atau termediasinya konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik yang teridentifikasi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Permasalahan	Upaya Yang telah Dilakukan	Kendala
1	Belum tuntasnya ganti rugi lahan untuk proyek Batang Sinamar	Telah dilakukan koordinasi dan fasilitasi pihak terkait diantaranya dengan BIN Sumatera Barat Balai Air Provinsi, BKSDA, PU, Camat dan Wali Nagari	-
2	Permasalahan PLTMH 1. Masalah ganti rugi lahan antara pihak masyarakat dan perusahaan 2. Masalah penjualan batu secara sepihak oleh pihak perusahaan dimana batu tersebut berada di tanah ulayat masyarakat nagari	Telah dilakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian antara masyarakat dengan pihak perusahaan	-
3	Permasalahan batas wilayah antara masyarakat Jorong Kapua Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuah dengan nagari Sumpur Kecamatan Batipuah Selatan, konflik tapal batas ini sudah terjadi sejak Tahun 1826, Tahun 1936 (zaman Belanda) dan sudah ada keputusan Residen Belanda yang menyatakan lahan tersebut merupakan wilayah nagari Sumpur yang dilengkapi dengan gambar (Peta), dan pada tahun 1955 juga terjadi konflik dimana Bupati menguatkan	Telah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk fasilitasi penyelesaian konflik bersama Polres Padang Panjang dan tokoh masyarakat kedua nagari.	-

	keputusan Residen Belanda, masyarakat Jorong Kapua Nagari Bungo Tanjung tetap tidak menerima hasil tersebut. Saat ini masyarakat Nagari Sumpur Kecamatan Batipuah Selatan telah memasukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Padang Panjang atas lahan tersebut.		
4	Konflik pemanfaatan Talago Anguih antara Jorong Koto Panjang Nagari Tigo Jangko Kec. Lintau Buo Kab Tanah Datar dengan Nagari Tanjung Bonai Aur Kec. Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung	Konflik Talago Anguih ini sudah dalam proses Provinsi.	-
5	Konflik tapal batas wilayah antara Nagari Simawang dengan nagari Bukik Kanduang Kabupaten Solok	Konflik Talago Anguih ini sudah dalam proses Provinsi.	-
6	Konflik Tapal batas wilayah dan Talago antara Nagari Koto Baru Kec. X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan nagari Banuhampu Kab Agam.	Konflik Talago Anguih ini sudah dalam proses Provinsi.	-
7	Konflik pemanfaatan Galangang Pacu Kudo Dang Tuanku antara Nagari Lima Baringin dengan Nagari Saruaso. Konflik ini mengakibatkan dibatalkannya agenda daerah Pacu Kudo di Kabupaten Tanah Datar.	Konflik ini sudah dalam proses penentuan batas wilayah oleh Tim Penentuan batas nagari.	

Konflik diatas dapat termediasi dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai- Nilai Luhur Budaya Bangsa

Dalam kegiatan ini telah dilaksanakan sosialisasi Bela Negara dengan rencana 75 orang siswa SMA/SMK/MA dengan realisasi 72 orang siswa dan pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional sebanyak 13 kali dengan capaian kinerja kegiatan 96 % .

- b. Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila

Kegiatan ini dilaksanakan berupa temu ramah Bupati dan Veteran di Gazebo Indo Jalito pada Tanggal 17 Agustus 2017 setelah Upacara Detik-

detik Proklamasi dan pada hari pahlawan pada tanggal 10 November 2017. Kegiatan ini direncanakan untuk memfasilitasi 548 veteran dengan realisasi 360 veteran dengan capaian kinerja kegiatan 65,69 %

c. Kegiatan Fasilitasi forum wawasan kebangsaan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa pemahaman generasi muda terhadap wawasan kebangsaan melalui kegiatan- lomba lagu wajib dan lomba PBB yang telah dilaksanakan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus 2017, dan sosialisasi Wawasan Kebangsaan kepada 150 orang Siswa SMA/SMK/MA yang dilaksanakan pada Bulan November 2017 dengan realisasi siswa yang hadir 135 orang. sehingga Capaian kinerja Kegiatan ini 90 %

4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

1. Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba.

Kegiatan ini berupa penyuluhan narkoba pada OKP dan Ormas, serta menghimbau masyarakat untuk menjauhi narkoba melalui spanduk, brosur dan stiker. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan 2 kali terhadap 180 orang OKP, dan 180 orang Ormas dan lembaga unsure Nagari di laksanakan pada Bulan Oktober 2017. Dari 380 orang peserta sosialisasi yang di rencanakan dihadiri oleh 342 orang dengan capaian kinerja kegiatan 90 %.

2. Penyuluhan Pencegahan Dini Penyakit Masyarakat

Kegiatan ini berupa penyuluhan Pekat ke 14 Kecamatan di kabupaten Tanah Datar dan pelaksanaan razia di daerah yang rentan peredaran minuman keras dan narkoba. Kegiatan razia telah dilaksanakan pada Bulan Ramadhan. Sedangkan kegiatan penyuluhan ke 14 Kecamatan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2017. Dari rencana razia 3 kali razia terlaksana 1 kali razia dengan capaian kinerja kegiatan 66,50 %.

5. Program Pendidikan Politik Masyarakat

1. Fasilitasi bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Kegiatan ini dilaksanakan berupa pemberian pembekalan kepada Partai politik tentang proses pengajuan bantuan partai politik kepada 10 partai yang wakilnya terpilih sebagai Anggota DPRD yang telah selesai

dilaksanakan Bulan Juni 2017. Setelah itu dilakukan verifikasi Partai terhadap yang akan menerima Bantuan Partai dan telah selesai dilaksanakan. Saat ini sedang berlangsung verifikasi terhadap Proposal yang diajukan oleh Partai Politik sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terlaksana dengan capaian kinerja kegiatan 100%.

2. Pembinaan Organisasi masyarakat

Kegiatan ini berupa pembekalan kepada Ormas dan verifikasi pendaftaran Ormas. Kegiatan pembekalan dengan materi Undang –Undang Ormas serta Perpu No. 2 Tahun 2017 dilaksanakan Bulan November 2017. Kegiatan ini terlaksana dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa surat menyurat guna menunjang terdukungnya tupoksi dan operasional kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik guna menunjang terdukungnya tupoksi dan operasional kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

3. Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi terhadap pembayaran pajak atas kendaraan operasional guna menunjang pelaksanaan tupoksi dan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

4. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembelian alat kebersihan seperti sapu lidi, sapu ijuk, kemoceng, sabit, tong sampah, sunlight,

rinso, super pel, densol, porstex dll. dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan alat tulis kantor guna menunjang terdukungnya tupoksi dan operasional kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebagai penunjang terdukungnya tupoksi dan operasional kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

7. Kegiatan Penyediaan Komponen dan Instalansi Listrik/ Penerangan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan komponen dan instalasi listrik/penerangan guna menunjang terdukungnya tupoksi dan operasional kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan seperti penyediaan bahan bacaan (koran) sebagai media informasi bagi aparatur dan guna menunjang terdukungnya tupoksi dan operasional kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman seperti penyediaan makan dan minum kegiatan rapat dan makan minum kegiatan yang dilaksanakan guna menunjang terdukungnya tupoksi dan operasional kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

10. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna menunjang terdukungnya tupoksi dan operasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

11. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknik Perkantoran

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan tenaga pendukung administrasi perkantoran guna menunjang terdukungnya tupoksi dan operasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan berupa pengadaan peralatan gedung kantor sebagai berikut :

- Pengadaan lemari arsip sebanyak 1 (satu) unit.

Semua kegiatan pengadaan ini untuk menunjang terlaksananya tupoksi dan operasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan gedung kantor seperti pengadaan wireless dan genset guna untuk menunjang terdukungnya tupoksi dan operasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sehingga diharapkan bisa meningkatkan usia pakai gedung bangunan kantor berupa perbaikan dan pengecatan seluruh gedung kantor guna menunjang terdukungnya tupoksi dan operasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini

dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

- d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional berupa perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, BA 39 E, BA. 8809 E dan kendaraan dinas roda 2, BA 6279 EP, dan BA 4284 E sehingga diharapkan bisa meningkatkan usia pakai kendaraan dinas/operasional kantor guna menunjang terdukungnya tupoksi dan operasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor berupa pemeliharaan peralatan kantor seperti pc unit, laptop, printer, kamera, infocus dan kipas angin dll sehingga diharapkan bisa meningkatkan usia pakai peralatan guna menunjang terdukungnya tupoksi dan operasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.
- f. Kegiatan Pemeliharaan ruti/ berkala mebeluer
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin/berkala kursi kerja, meja kerja serta mebeluer kantor lainnya guna menunjang terdukungnya tupoksi dan operasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini terealisasi berupa pemberian bantuan biaya pendidikan kepada aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan anjab di Bukittinggi yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kapasitas aparatur tentang pendidikan dan pelatihan di bidang formal guna menunjang terdukungnya tupoksi dan operasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Kegiatan Penyusunan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Melalui kegiatan ini dilakukan penyusunan LAKIP 2017 sebagai bahan evaluasi dan pengukuran kinerja satuan kerja. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, dengan menghasilkan 1 (satu) dokumen LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017 dengan capaian kinerja kegiatan 100 %.

- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan ini dilakukan dengan menyusun laporan keuangan dan asset Kantor Kesbangpol dalam bentuk Buku I dan Buku II . Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik capaian kinerja kegiatan 100 %.

- c. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Tahunan

Kegiatan ini dilakukan dengan menyusun Renja, RKA Kantor kesbangpol. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik capaian kinerja kegiatan 100 %.

Capaian sasaran dinilai berhasil. Hal ini merupakan hasil dari sejumlah faktor yang merupakan pendorong suksesnya kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut:

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan tugas.

Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembinaan kesatuan bangsa dan politik dipengaruhi oleh :

- a) Makin terbukanya komunikasi antar infra dan supra struktur politik;
- b) Makin kuatnya komunikasi antar Kominda dan Forkopinda dalam membahas Isu strategis Daerah dan permasalahan yang berpotensi konflik di masyarakat.
- c) Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat;
- d) Makin meningkatnya kepedulian orkesmas dalam pemberdayaan masyarakat;
- e) Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai budaya nasional;

- f) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- g) Masih potensialnya perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian nasional;
- h) Semakin berperannya tokoh masyarakat dalam membantu dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup bermasyarakat;
- i) Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi masalah keamanan dan kenyamanan lingkungan;

Kendati begitu, pelaksanaan tugas pembinaan kesatuan bangsa dan politik hingga saat ini masih dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Masih teridentifikasinya sejumlah persoalan dan isu yang mengarah pada disintegrasi bangsa dan mengemukakan situasi dan kondisi khusus seperti ancaman paham komunis dan kesiapan pelaksanaan pileg, pilpres dan pemilukada pada wilayah Kabupaten Tanah Datar. Dan adapun faktor yang dianggap menjadi penghambat dan tantangan dalam rangka pencapaian kinerja Kesbangpol, sebagai berikut :

Faktor penghambat pelaksanaan tugas.

- a) Masih eksisnya perilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda reformasi;
- b) Kehadiran banyak partai politik di sisi lain dinilai belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan bangsa sehingga muncul pergeseran sikap yang menjatuhkan kredibilitas pemerintah;
- c) Kebebasan menyampaikan aspirasi dan pendapat tanpa memperhatikan norma dan etika yang berlaku diwujudkan dalam bentuk tindakan provokatif, hujatan serta prasangka dan kecurangan lainnya menunjukkan perilaku masyarakat yang belum berdemokrasi secara dewasa dimana ini menjadi tantangan yang serius dalam menuntaskan agenda reformasi;
- d) Adanya fenomena disintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e) Situasi geografis Kabupaten Tanah Datar yang rawan bencana dan rawan terhadap lintas perdagangan narkoba;

- f) Krisis keuangan global secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian masyarakat yang tergantung dari komoditi pertanian yang diperdagangkan secara internasional akibat berkurangnya permintaan luar negeri.

Untuk itu, dalam mengatasi sejumlah persoalan diatas, dan guna mengantisipasi permasalahan yang sama, Kantor Kesbangpol mengambil langkah langkah sebagai berikut :

- a) Mengevaluasi secara mendalam program yang belum maksimal pencapaiannya untuk menemukan strategi yang lebih baik dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.
- b) Perencanaan yang lebih realistis dalam menentukan target yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan seluruh kemampuan yang ada.
- c) Menempuh sejumlah langkah dan tindakan dalam mengembangkan kebijakan politik nasional baik kepada aparat kesbangpol maupun terhadap organisasi politik ataupun ormas/LSM.
- d) Melakukan pemantauan dan pengamatan secara terpadu melalui tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan serta melarang kegiatan kelompok kemasyarakatan yang meresahkan ditengah masyarakat.
- e) Menganggarkan dana guna mendukung Pendidikan Politik Masyarakat, Program Penyelenggaraan dukungan Pemilu dalam rangka mendukung pileg , dan pilpres dan pilkada;
- f) Memaksimalkan kinerja dan koordinasi terkait kegiatan kewaspadaan dini dan penanganan konflik serta melakukan pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing, *Non Government Organization* (NGO) dan lembaga asing di daerah.

2.2.1. Analisis Capaian Keuangan

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar (KESBANGPOL) sebesar **Rp. 2.167.599.121,- (Dua milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah)** dengan rincian realisasi keuangan per - kegiatan pada tahun 2017 sebagai berikut :

NO.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
		2017	2017	(%)
1	3	4	5	6
	Program pelayanan administrasi perkantoran	231.288.000	177.290.126	76,65%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.900.000	1.899.000	99,95
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.500.000	17.344.076	73,80
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Bermotor	4.500.000	2.548.850	56,64
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.000.000	3.599.000	89,98
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000	34.797.100	99,42
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	10.837.000	98,52
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.916.500	95,83
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	5.370.000	53,70
	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.888.000	4.847.600	32,56
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	108.000.000	78.531.000	72,71
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknik Perkantoran	16.500.000	15.600.000	94,55
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	133.700.000	93.169.660	69,69%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	8.820.000	88,20
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	13.000.000	12.014.500	92,42
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas operasional	96.700.000	60.424.160	62,49
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.000.000	5.711.000	81,59
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	2.000.000	1.200.000	60,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	782.000	7,82%

	Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000	782.000	7,82
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	23.000.000	16.294.000	70,84%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	4.342.000	43,42
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8.000.000	7.778.000	97,23
	Penyusunan Perencanaan Tahunan	5.000.000	4.174.000	83,48
1	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1.118.640.000	918.300.835	82,09%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	131.000.000	124.114.000	94,74
	Fasilitas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	309.020.000	253.267.922	81,96
	Fasilitasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	240.000.000	174.948.600	72,90
	Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	190.000.000	168.905.000	88,90
	Fasilitasi Penanganan Isu Strategis Daerah	248.620.000	197.065.313	79,26
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	221.878.000	136.323.200	61,44%
	Fasilitas Pencegahan dan Penanganan Konflik di Tengah Masyarakat	221.878.000	136.323.200	61,44
2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	509.062.000	371.806.500	73,04%
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	250.412.000	205.005.500	81,87
	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai- Nilai Perjuangan	142.100.000	86.579.400	60,93
	Fasilitasi Forum Wawasan Kebangsaan	116.550.000	80.221.600	68,83
3	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	614.902.000	398.009.200	64,73%

	Penyuluhan pencegahan/penggunaan minuman keras dan narkoba	263.238.000	165.636.800	62,92
	Penyuluhan Pencegahan Dini Penyakit Masyarakat	351.664.000	232.372.400	66,08
4	Program Pendidikan Politik Masyarakat	93.000.000	55.623.600	59,81%
	Fasilitas Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	47.000.000	30.776.000	65,48
	Pembinaan Organisasi Masyarakat	46.000.000	24.847.600	54,02
	JUMLAH	2.955.470.000	2.167.599.121	73,34

Pada umumnya capaian kinerja keuangan rata-rata diatas 73 %. Namun capaian kinerja kegiatan dapat mencapai rata-rata diatas 90 %.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Datar

Salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa dan negara diwaktu-waktu mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mampu mewujudkan system dan budaya politik yang demokratis baik nasional maupun di daerah.

Terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, tantangan ini juga menjadi dasar dan kerangka penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depannya yakni penguatan persatuan dan kesatuan serta pembangunan system politik demokrasi.

Dalam menghadapi tantangan tersebut diperlukan kajian dan analisis kinerja pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan kinerja yang dibutuhkan. Kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar

Pelayanan Publik (SPP) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Untuk lebih jelas dan rinci dapat dilihat dari kedudukan, tugas dan fungsi kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

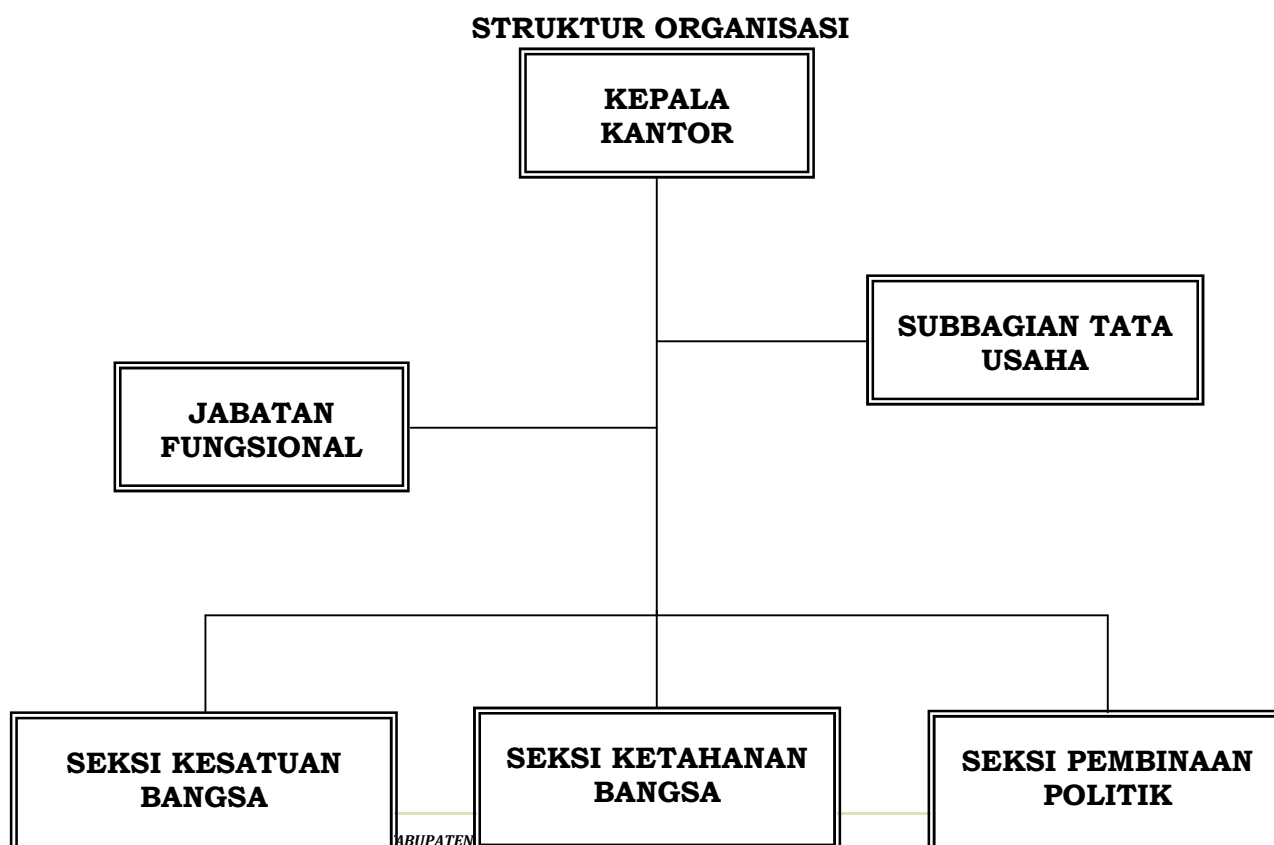
2.3.1 Kedudukan, Struktur, Tugas Pokok, dan Fungsi

a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan unsur teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggara unsur pemerintahan daerah dalam urusan wajib.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik.

b. Struktur



c. Tugas Pokok

Adapun tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

d. Fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang kesatuan bangsa, dan politik ;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang di bidang kesatuan bangsa dan politik.;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dan ;
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan politik lebih banyak bersifat teknis sebagai penyelenggara teknis dalam salah satu organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang ada guna menunjang pelaksanaan kinerja Bupati Tanah Datar.

Adapun data akuntabilitas kinerja yang digunakan bersumber dari data internal yang berasal dari system informasi yang diterapkan dan data eksternal baik primer maupun sekunder.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dari beberapa aspek (kondisi) sebagai berikut :

a. Kondisi Umum

Berdirinya suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan fondasi bagi kelangsungan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat dan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kemajemukan dengan berbagai perbedaan suku, bahasa, agama, adat istiadat, struktur wilayah dalam wilayah NKRI. Hal ini memungkinkan akan rawan konflik sosial, keamanan, ketertiban, politik, ideology, dan ekonomi yang dapat mengarah pada konflik vertical dan horizontal.

Pelaksanaan pembangunan yang terpusat dan tidak merata ternyata telah memicu akan munculnya konflik social. Menguatnya gejala disintegrasi bangsa seperti terjadi pada akhir-akhir ini dalam bangsa kita.

Pembangunan nasional di daerah sejauh ini masih memerlukan perhatian serius, karena permasalahan pembangunan ini banyak mengalami perkembangan sejalan dengan berkembangnya kemajuan iptek sehingga tuntutan terhadap kemajuan pembangunan selalu menimbulkan permasalahan seiring dengan perkembangan kemajuan tersebut. Untuk itu diperlukan sinkronisasi antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang diharapkan akan dapat saling menopang guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pengaruh globalisasi membawa masyarakat kearah keterbukaan, disamping berdampak positif untuk kemajuan bangsa juga akan berdampak negative terhadap ketahanan bangsa. Salah satunya contoh yang kita rasakan dampak zaman reformasi ini adalah dengan banyaknya terjadi perubahan yang mendasar dalam pembangunan system politik nasional. Perubahan ini adalah perlunya penegakkan kedaulatan rakyat dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pembangunan Politik difokuskan untuk meningkatkan dan mengembangkan budaya politik yang demokratis dan penegakkan hukum serta menghormati HAM yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang. Ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah khususnya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah baik untuk propinsi Sumatera Barat dan Bupati Tanah Datar secara serentak.

Dan akhir-akhir ini perkembangan system politik yang demokratis telah berjalan sedemikian rupa baik pada pemerintahan maupun pada masyarakat luas. Hal ini terbukti dengan bermunculan banyak partai politik, yang menaruh harapan bagi masyarakat bersaing secara demokratis dan dinamis dalam membentuk pemerintahan yang legitimate.

Pemerintahan yang terbentuk saat inipun dinilai masyarakat belum mampu mengatasi masalah bangsa, sehingga munculnya pergeseran sikap yang semakin menjatuhkan kredibilitas pemerintah dalam arti terjadinya

krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hadirnya banyak organisasi kemasyarakatan juga merupakan pemusatan kekuatan dalam kegiatan bermasyarakat. Untuk itu perlu dikembangkan komunikasi timbal balik antar sesama organisasi kemasyarakatan dan antara organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah. Dengan adanya komunikasi yang baik akan dapat disejajarkan program pemerintah dan sebaliknya organisasi kemasyarakatan juga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya.

Kesenjangan ekonomi dewasa ini berakibat peningkatan intensitas tindak kriminal, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Kondisi Obyektif

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan instansi pemerintah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dimana komponen pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berperan di bidang pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dan memfasilitasi pengembangan system politik yang demokratis. Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik berimplikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kurang baiknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini menjadi tantangan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah factor yang dapat dikategorikan sebagai factor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun demikian terdapat juga momentum strategis, dimana terdapat factor positif yang dapat digunakan sebagai kekuatan signifikan yang mampu mendorong peningkatan kinerja.

Dilihat dari Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

a. Kondisi politik :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi.

2. Belum maksimalnya infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi.
3. Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Masih eksisnya perilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda reformasi.
5. Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi.
6. Perbaikan kinerja pelayanan publik menjadi tantangan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, karena dengan kualitas yang baik akan timbul kepuasan dan kepercayaan masyarakat.

b. Kondisi Sosial:

1. Belum optimal pemantapan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat terutama para generasi muda.
2. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh globalisasi.
4. Rendahnya pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga terjadinya pergesekan/konflik antar pemuda, kampung, suku dll.
5. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

c. Kondisi Ekonomi :

1. Belum stabil harga sembako ditengah masyarakat dengan terjadinya kenaikan harga BBM yang tidak stabil sehingga harga pasar tidak terkendali dan terkontrol. Hal ini menimbulkan keresahan masyarakat terutama masyarakat ekonomi rendah.
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalan sumber pendapatan asli daerah.
3. Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.

5. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.

d. Kondisi Keamanan dan Ketentraman :

1. Masih terdapatnya konflik ekonomi, sosial dan politik menimbulkan tindak kriminal ditengah masyarakat sehingga meningkatnya kasus kriminal dan berdampak pada ketentraman dan keamanan ditengah-tengah masyarakat.
2. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar.

Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Kinerja

a. Kondisi Politik :

1. Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik.
2. Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
3. Semakin berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah.
4. Makin meningkatnya kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat.
5. Semakin berkembangnya partisipasi politik masyarakat.

b. Kondisi Sosial Budaya :

- Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional.
- Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat NKRI.
- Makin mantapnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Sumatera Barat "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
- Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap laten ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

- Makin meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat.
- Berkembangnya perguruan tinggi sebagai sumber penyerapan iptek.

c. Kondisi Ekonomi :

- Terdapatnya potensial kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
- Terdapatnya kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sumber kekuatan perekonomian.
- Kondisi geografis Kabupaten perekonomian daerah.
- Terbukanya kesempatan masyarakat untuk melakukan inovasi teknologi.
- Tanah Datar yang pada umumnya penduduk petani, pedagang dan pegawai negeri
- Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten lain yang kaya akan sumber daya alam.

d. Kondisi Keamanan/Ketentraman :

- Terkoordinasinya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat.
- Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu penyelesaian konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.
- Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
- Terakomodasinya potensi informan sebagai pemberi informasi terhadap munculnya konflik. Informasi ini secara cepat dan tepat dapat diterima sehingga penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat terlaksana dengan baik.
- Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan Daerah, Nasional dalam menghadapi era globalisasi.

Perbandingan dilakukan berorientansi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang timbul agar capaian kinerja samapai 6 (enam) tahun kedepan dapat tercapai.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program realitas dengan mengantisipasi perkembangan/dinamika masa depan. Dengan pendekatan yang jelas dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam perjalanan proses penyusunan RKPD nantinya akan dilakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan dari setiap SKPD yang menyangkut kepada kegiatan masyarakat.

Kantor kesbangpol sampai saat ini dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat berbagai kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kegiatan masyarakat diantaranya diantaranya melayani melayani penerbitan Izin Penelitian bagi mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri dan lembaga penelitian baik lokal maupun internasional yang melakukan penelitian di Kabupaten Tanah Datar.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Dalam tujuan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu termasuk didalamnya pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah dimana kepada daerah diberi kewenangan untuk mengelola segenap urusan pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kehakiman, moneter dan fiskal serta urusan agama. Namun demikian urusan kesatuan bangsa dan politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan mengganti nama menjadi urusan pemerintahan umum dan politik.

Dengan ditanganinya urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik ke dalam urusan wajib pemerintahan oleh pemerintah daerah, permasalahan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat direspon dengan cepat oleh pemerintah daerah sekaligus dalam kerangka pengawalan kebijakan politik dalam negeri kita ke depan.

Pembangunan politik dalam negeri diarahkan pada terwujudnya demokrasi melalui konsolidasi demokrasi yang bertahap supaya demokrasi konstitusional dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan politik nasional dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh dan mengoptimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sejalan dengan amanat konstitusi dan menyepakati kembali makna penting persatuan nasional dalam konstelasi politik yang sudah berubah; untuk mewujudkan pelembagaan rekonsiliasi nasional beserta segala kelengkapan kelembagaannya dan mewujudkan penataan pelaksanaan otonomi daerah.

Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam mulai dari suku, agama, ras dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi serta tidak terkendalinya dinamika kehidupan politik.

Pembangunan dan pelembagaan politik dalam negeri telah disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem prseidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama yakni yang pertama membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi.

Disamping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, terutama konflik yang bersifat horisontal. Konflik tersebut akan mengakibatkan hilangnya rasa aman, dan sebaliknya akan menimbulkan rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci dan antipati sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Dalam hal ini untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah menyusun sistem yang mengatasi dalam penanganan konflik yang kemungkinan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Sistem penanganan Konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif. Selain itu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti dalam bentuk Instruksi presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013.

Posisi wilayah Kabupaten Tanah Datar yang sangat signifikan terhadap masalah dengan adanya wilayah yang merupakan perbatasan antar propinsi (Propinsi Riau), arus jalan darat bagi perdagangan atau peredaran dan penyebaran narkoba, sementara Indonesia sudah dalam status Darurat Narkoba.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar antar lain kemiskinan yang memicu terjadinya perebutan lapangan pekerjaan dengan munculnya pengangguran. Kondisi ini akan menimbulkan kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan tanpa aspek politik.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar lebih dititikberatkan pada pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan. Dengan mengurangi angka kemiskinan

dan pengangguran akan mewujudkan masyarakat sadar hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk mencapai masyarakat yang sadar hukum dalam pemerintahan yang bersih dengan dilaksanakannya program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar. Adapun strategi dan kebijakan dengan antara lain (1).meningkatkan iklim kehidupan kebangsaan dinamis, tentram, rukun dan damai yang ditopang pada makin mantapnya wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, ketahanan bangsa serta kemampuan bela negara bagi segenap lapisan masyarakat; (2) Meningkatnya sistem politik yang demokratis yang berbasis pada makin fungsinya supra dan infra struktur politik secara efektif; (3). Mantapnya kehidupan sosial, ekonomi budaya dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (4). Dan untuk mewujudkan aman dan nyamannya kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang didasari oleh mantapnya kemampuan aparatur dalam sistem dan mekanisme penanganan masalah strategis dan kontijensi.

Adapun Kebijakan dalam Rencana Kerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar berdasarkan antara lain sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana dalam pembangunan dalam upaya mencari kesinambungan pembangunan didaerah dan menjaga keterpaduan antara pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Fasal 48) ,mengharapkan bahwa hasil Evaluasi RPJM menjadi bahan bagi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk priode berikutnya.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 32 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar dalam jangka panjang.

Mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, maka visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar adalah :

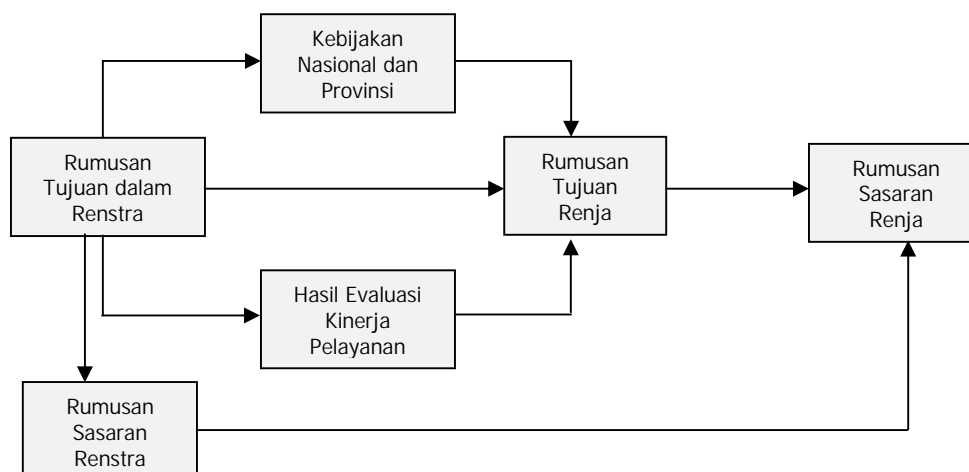
**“TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS,
BERBUDAYA, BERSATU, TENTRAM, AMAN DAN NYAMAN”**

Yang dimaksud dengan *kehidupan masyarakat yang demokratis* adalah untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, berbudaya dinamis dan bersatu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan akan tercipta suasana tentram, aman, damai yang kondusif yang dilandasi semangat kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan yang menjiwai seluruh masyarakat sehingga pada akhirnya akan menciptakan rasa aman, tentram dan nyaman dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengedepankan profesionalisme yang bertitik tolak pada landasan keimanan dan ketaqwaan sebagai fondasi utama serta rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan pada Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Datar.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar disusun dengan mempedomani rumusan tujuan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana dilustrasikan sebagai berikut:



A. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun hasil rumusan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Tabel 1
TUJUAN DAN SASARAN

NO.	TUJUAN	SASARAN
1.	<i>Menuju Masyarakat yang berkehidupan kebangsaan yang demokratis, dinamis, tentram dan damai dengan ditunjang pada nilai- nilai wawasan kebangsaan dan ideology Pancasila</i>	<i>Meningkatkan pemahaman masyarakat pada nilai- nilai wawasan kebangsaan dan ideology Pancasila</i>

NO.	TUJUAN	SASARAN
2.	<i>Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta memfasilitasi masyarakat pada upaya penyelesaian masalah dengan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik atau gangguan keamanan yang terjadi ditengah masyarakat</i>	<i>Meningkatkan keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat</i>
3.	<i>Mewujudkan system politik yang demokratis dan beradab</i>	<i>Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemilu</i>
4.	<i>Meningkatkan kesadaran generasi muda dan masyarakat terhadap maksiat dan bahaya narkoba</i>	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penyakit masyarakat dan narkoba</i>

B. SASARAN DAN PROGRAM

Sasaran pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan dan diwujudkan dalam bentuk program yang diaplikasikan terhadap kegiatan dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten. Adapun sasaran dan program dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL 2
SASARAN DAN PROGRAM

No.	Sasaran Strategis	Program
1.	<i>Meningkatkan pemahaman masyarakat pada nilai- nilai wawasan kebangsaan dan ideology Pancasila</i>	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2.	<i>Meningkatkan keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat</i>	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

		2. Prgram pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
3.	<i>Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemilu</i>	1. Program Pendidikan Politik Masyarakat 2. Prgram Dukungan Penyelenggaraan Pemilu
4.	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penyakit masyarakat dan narkoba.</i>	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka disusunlah rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 sebagai wujud untuk menentukan tindakan prioritas. Program adalah rangkaian kegiatan utama yang dipaket berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yang dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan Tahun 2019

No.	Urusan	Program / Kegiatan	Pagu Dana
1	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik		
	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	262.688.000,00
	1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.900.000,00
	1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23.000.000,00
	1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.500.000,00
	1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.500.000,00
	1.5	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000,00
	1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.000.000,00
	1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00
	1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00
	1.9	Penyediaan makanan dan minuman	14.888.000,00
	1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	93.000.000,00
	1.11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran	62.400.000,00
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	83.130.000,00
	2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	74.130.000,00
	2.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.000.000,00
	2.3	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.000.000,00
	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00
	3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	10.000.000,00
	4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000,00
	4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000,00
	4.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.000.000,00
	4.3	Penyusunan perencanaan tahunan	5.000.000,00

	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.214.837.000,00
	5.1	Pengendalian keamanan lingkungan	116.000.000,00
	5.2	Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	563.837.000,00
	5.3	Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	535.000.000,00
	6	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	294.878.000,00
	6.1	Fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik di tengah masyarakat	294.878.000,00
	7	Program pengembangan wawasan kebangsaan	419.255.000,00
	7.1	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	305.655.000,00
	7.2	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai perjuangan	113.600.000,00
	8	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	447.827.000,00
	8.1	Penyuluhan pencegahan dini penyakit masyarakat	447.827.000,00
	9	Program pendidikan politik masyarakat	149.000.000,00
	9.1	Fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik	49.000.000,00
	9.2	Pembinaan organisasi masyarakat	50.000.000,00
	9.3	Fasilitasi Pendaftaran Orkemas	50.000.000,00
	10	Program dukungan penyelenggaraan PEMILU	100.000.000,00
	10.1	Sosialisasi pemilu	100.000.000,00
		Total	3.006.615.000,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 adalah merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menjaga kesinambungan rencana strategis tahun 2015-2020 untuk pencapaian pembangunan daerah. Rencana Kerja ini akan menjadi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan untuk kegiatan 1 (satu) tahun, sehingga apa yang diprogramkan dapat terwujud dan mencapai tujuan serta sasaran yang disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Datar dan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar tahun 2019, maka penetapan skala prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran visi dan misi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan antar sesama Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar maupun dengan OPD yang melaksanakan fungsi lain. Dan berharap adanya rencana kerja ini juga dapat memberikan peningkatan kualitas, kuantitas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kami menyadari dalam menyusun rencana kerja ini masih terdapat kekurangan dari semua sisi. Untuk itu demi penyempurnaan dalam menyusun rencana kerja pada tahun depan, kami mohon akan saran dan kritikan sehingga terwujudnya dan tercapinya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan khususnya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.